

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MEWUJUDKAN
TERTIB LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

SOPHI RAHMA UMA



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2019

ABSTRAK

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh :

Sophi Rahma Uma

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan waktu dan triangulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung Tahun 2018 belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tertib lalu lintas seperti, kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan teknis perhubungan menyebabkan lemahnya Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tertib lalu lintas, kurangnya kapasitas jalan yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, setelah itu rendahnya kesadaran masyarakat akan peninjauan fasilitas umum lalu lintas dan kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara. Hal ini yang menjadi penyebab utama gagalnya setiap kebijakan yang telah diterapkan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan tertib lalu lintas.

Kata kunci : Peran, Dinas Perhubungan, Tertib Lalu Lintas.

ABSTRACT

THE ROLE OF DEPARTEMENT TRANSPORTATION IN REALIZING ORDERLY TRAFFIC IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By :

Sophi Rahma Uma

The Purpose of this study is to describe the extent of the role of transportation agencies in realizing traffic order in the city of Lampung. The research method used in this study was qualitative descriptive with the subject of research in the transportation department of the city of Lampung. Data collection techniques use interview guidelines, observation guidelines for observation, documentation guidelines while data analysis uses credibility testing with time extension and triangulation.

The results of this research indicate that the role of the Department Transportation in realizing orderly traffic in the city of Bandar Lampung city in 2018 haven't been able to solve these problems. As several factors that affect the role of the Department Transportation in overcome traffic jams such as, the lack of human resources with the background of technical education of transportation caused by poor performance of Department Transportation of Bandar Lampung City in overcoming traffic jam, the lack of facilities that road capacity is not matched by increase number of motorbikes in Bandar Lampung, moreover society awareness maintaining of public traffic facilities and awareness to obeying traffic regulations in driving. This is the main caused failure of policy which has been implemented by Department Transportation of Bandar Lampung city orderly traffic

Keywords : Role, Department of Transportation, Orderly Traffic

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MEWUJUDKAN
TERTIB LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

OLEH

SOPHI RAHMA UMA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

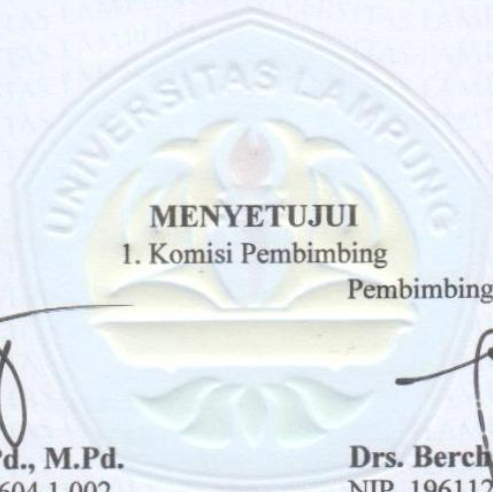
Nama Mahasiswa : **Sopfi Rahma Uma**

No. Pokok Mahasiswa : **1413032067**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

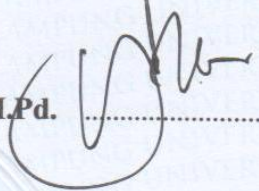
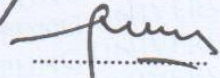
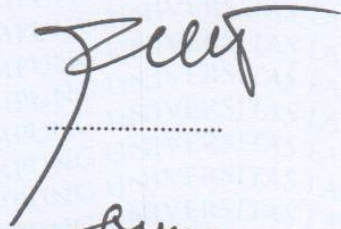
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

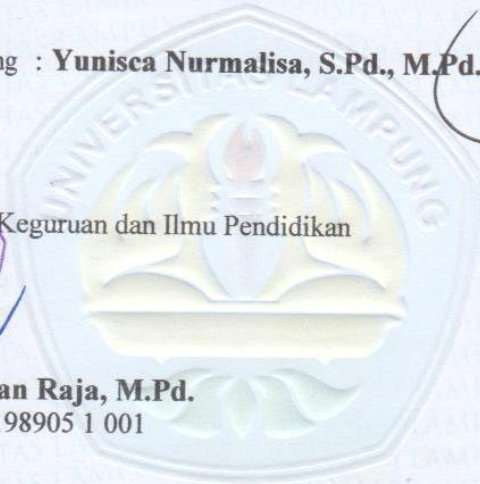
Sekretaris : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP 19620804 198905 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Sophi Rahma Uma
NPM : 1413032067
Prodi/Jurusan : PPKn/ Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 26 Juli 2019



Sophi Rahma Uma
NPM 1413032067

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 08 Juni 1995 dengan nama lengkap Sophi Rahma Uma. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Edy Lukman (Alm) dan Ibu Betti Mutiah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis antara lain :

1. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Sukajawa Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP AL-KAUTSAR Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013

Pada tahun 2014 penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pada bulan Juli 2017, penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Program Profesi Kependidikan (PPK) selama tujuh puluh hari di Desa Kasui Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

Prestasi besar tidak diraih dengan paksaan,
tetapi diraih oleh rentetan tindakan kecil yang menyatu
(Vincent Van Gogh)

Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya,
tanpa kita mengerti tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah
(Seo Hok Gie)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT
Atas segala ujian, kemudahan, limpahan rahmat dan karunia-Nya,
Saya persembahkan karya ini sebagai tanda bakti
Dan tanda cinta saya kepada :

Kedua orang tua saya yaitu Bapak Edy Lukman (Alm) dan Ibu Betti Mutiah, terutama kepada ibu yang sudah berjuang memberikan segala yang terbaik darinya sehingga saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi ini. Terima kasih kepada kakaku Sheni Olivia, A.md.Keb yang telah memberikan semangat dalam hidupku tanpa lelah. Terimakasih atas kasih sayang, do'a, dukungan, semangat dan pengorbanan yang sudah diberikan kepada saya, semoga Allah SWT meridhai saya untuk memberi yang terbaik dari saya kepada kepada kedua orang tua, keluarga, teman, dan orang terdekat

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung serta sebagai Pembimbing I terimakasih atas saran dan masukannya.
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku pembimbing II terimakasih atas saran dan masukannya.
8. Ibu Yunischa Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas I terimakasih atas saran dan masukannya.
9. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan.
11. Terima kasih untuk Ibunda Betti Mutiah, terimakasih atas keikhlasan, cinta dan kasih sayang, do'a, motivasi, serta ketulusan yang telah diberikan selama ini demi keberhasilanku.

12. Terima kasih untuk Almarhum Ayahanda Edy Lukman yang selalu mendoakan anakmu dari surga sana demi keberhasilanku.
13. Terima Kasih untuk kakakku Sheni Olivia, A.Md.Keb yang telah mensponsori segala kegiatan kampusku tanpa sponsor dari Uni mungkin adek tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Bapak Ahmad Husna,S.STP.,MH, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian untuk penulisan skripsi ini.
15. Terima kasih untuk semua Pejabat Struktural , Staf dan Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang telah bersedia membantu dan memberikan keterangan dalam mengisi lembar wawancara penulisan skripsi ini.
16. Terimakasih untuk keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan dalam mengerjakan tugas akhir ini. tanpa usaha dan doa kalian mungkin aku tidak dapat menyelesaikannya dengan baik
17. Terima kasih untuk rekan kerjaku di Dinas Perhubungan khususnya Bidang Program dan Informasi Bapak I Putu Ekas Suyasa, MM, bang Ridwansyah, SE, bang Arie Saputra Tarbin, SH, Dona Saputri, S.Pd yang telah memberikan motivasi dan memberikan izin tidak masuk kerja demi menyelesaikan skripsi ini.
18. Terima kasih untuk sepupuku Revania Putri Utami, S.Pd yang selalu mendengarkan, memberikan arahan dan dukungan dalam bentuk apapun.
19. Terima kasih Sahabatku SNAP Yara Nur Intan, S.AB, Intan Chairanissa Lubis, S.AB, Nadia Maudyna Eldarini , S.IP, Taria Susandhy, SH, Mesfi

Vidimarsella, SE, Elsa Yuni Hercia, SE dan Ayu Lutfiah Putri, SE yang selalu memberikan hiburan dikala aku lelah mengerjakan skripsi ini.

20. Terima kasih untuk Desi Wulandari, S.Pd, Seri Sudiwito, S.Pd, Nurkhasanah, S.Pd, Shoumy Aulia Pratiwi, S.Pd, Dian Ayu Mukti, S.Pd, dan Dana jaya Putra, S.Pd yang selalu kebersamai dalam suka maupun duka.
21. Keluarga Civic Education angkatan 2014 semuanya tanpa terkecuali terima kasih telah memberikan cerita baru dalam perjalanan hidup ini.
22. Teman-teman Seperjuangan PPL SMA 1 Kasui dan KKN Kasui Kabupaten Way Kanan tahun 2017, Hanisa Damayana, S.Pd, Ermayunita, S.Pd, Fiska Patricia Kusuma, S.Pd, Ade Eryanti, S.Pd, Siti Khoirohmah, S.Pd, Rika Intan Junia Sari, S.Pd, Ardion Pandu, S.Pd, Rif'an Hidayatullah, S.Pd, dan Dedi Ardiyanto, S.Pd yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran baru selama masa KKN serta doa dan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini.
23. . Serta semua pihak yang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

Sophi Rahma Uma
NPM. 1413032067

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
1. Ruang Lingkup Ilmu	11
2. Objek Penelitian	11
3. Subjek Penelitian	11
4. Lokasi Penelitian	11
5. Waktu Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	
1.. Tinjauan Tentang Peran	12
a. Pengertian Peran	12

2. Tinjauan Tentang Organisasi	14
a. Pengertian Tentang Organisasi	14
b. Organisasi Dinas Perhubungan	16
c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	16
d. Ruang Lingkup Dinas Perhubungan	18
3. Tinjauan Tentang Ketertiban Lalu Lintas	18
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	22
1. Tingkat Lokal	22
2. Tingkat Nasional	22
C. Kerangka Pikir	23

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	27
a. Definisi Konseptual	27
b. Definisi Operasional	28
D. Informan dan Unit Analisis	28
E. Instrumen Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Wawancara	30
2. Observasi	31
3. Studi Dokumentasi	31
G. Uji Kredibilitas	32
1. Memperpanjang Waktu	32
2. Triangulasi	32
H. Teknik Pengolahan Data	33
1. Editing	33
2. Tabulating dan Coding	34
3. Intepretasi Data	34
I. Teknik Analisis Data	34
1. Reduksi Data	34
2. Penyajian Data	35
3. Verifikasi	35
4. Rencana Penelitian	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Berdirinya DISHUB	38
2. Tujuan DISHUB	40
3. Sasaran DISHUB	41
4. Visi dan Misi DISHUB	41
5. Tupoksi DISHUB	43
6. Jumlah Pegawai DISHUB	62

7. Struktur Organisasi DISHUB	65
B. Hasil Penelitian	66
1. Peran DISHUB dalam Konteks Regulator	69
2. Peran DISHUB dalam Konteks Fasilitator	72
3. Peran DISHUB dalam Konteks Evaluator	75
C. Hasil Pembahasan	84
1. Peran DISHUB dalam Konteks Regulator	84
2. Peran DISHUB dalam Konteks Fasilitator	87
3. Peran DISHUB dalam Konteks Regulator	90
D. Keunikjan Hasil Penelitian	94
V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Data Lokasi CCTV yang ada di Kota Bandar Lampung.....	6
2. Data Target Pendidikan Pegawai DISHUB	63
3. Data Golongan Pangkat DISHUB.....	64
4. Data Narasumber Penelitian.....	67
5. Triangulasi	81

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	25
2. Triangulasi Menurut Denzin	33
3. Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	36
4. Rencana Penelitian	37
5. Struktur Organisasi	65

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Dekan FKIP Unila
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
6. Surat Keterangan
7. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing I
8. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing II
9. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas I
10. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas II
11. Surat Rekomendasi
12. Surat Izin Penelitian
13. Surat Keterangan Melakukan Penelitian
14. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
15. Surat Keterangan
16. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing I
17. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing II
18. Kartu Perbaikan Hasil Pembahas I
19. Surat Rekomendasi
20. Uji Kredibilitas Data
21. Kisi-Kisi Wawancara, Observasi dan Dokumentasi
22. Instrumen Wawancara, Observasi dan Dokumentasi
23. Instrumen Penelitian
24. Hasil Wawancara, Observasi dan Dokumentasi
25. Foto-Foto Hasil Penelitian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata pemerintahan yang baik merupakan hal penting pada sektor organisasi publik. Tata pemerintahan yang baik pada sektor publik belum tentu menjamin Peran pemerintah juga akan baik pada suatu negara. Hal tersebut tergantung kepada kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan suatu negara.

Saat ini, peran organisasi terutama organisasi publik mendapat sorotan dari masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat mulai kritis dalam menilai atas pelayanan yang diberikan terutama oleh organisasi publik. Masyarakat mulai menuntut kepada setiap organisasi publik dalam memberikan pelayanan umum, baik berupa barang atau jasa, agar lebih profesional dan berkualitas kepada setiap anggota masyarakat. Pelayanan yang lebih profesional dan berkualitas merupakan wujud dari *good governance* (tata pemerintahan yang baik), terutama dalam pelayanan publik.

Sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat harus selalu mengevaluasi peranannya. Baik dan buruknya suatu peran dari organisasi publik dapat dilihat dari tanggungjawab organisasi

tersebut dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan, hasil yang dicapai, dan sebagainya. Dengan demikian, jika terdapat kekurangan, dapat diperbaiki dan dapat memberikan dorongan atau memberikan dukungan peran yang sudah baik. Dengan adanya evaluasi tersebut, dapat diketahui seberapa optimalkah sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Bagus atau tidaknya suatu peran dari organisasi publik dapat diketahui dengan melakukan suatu pengukuran. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi peran dari suatu organisasi tersebut, misalnya lingkungan organisasi, budaya yang ada dalam organisasi, sarana dan prasarana, penilaian peranan dan umpan balik. Pengukuran atau peran pada suatu organisasi yang memiliki *output* dalam bentuk barang, dapat dilihat dari kuantitasnya yaitu jumlah barang yang dihasilkan atau seberapa lama barang tersebut dapat dihasilkan. Sementara peran pada suatu organisasi yang bergerak di bidang jasa dapat dilihat dari kepuasan pelanggan atau kualitas pelayanan yang diberikan suatu organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soerjono Soekanto 2009:212-2013). Selain itu, peran juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.

Dinas perhubungan adalah sebuah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Peran yang sangat penting dan strategis dalam ikut mendorong dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan daerah terutama keterkaitan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (*publik service*), penunjang kegiatan ekonomi daerah, dan salah satu potensi pendapatan daerah. Salah satu bidang transportasi yang memerlukan perhatian lebih yakni transportasi darat karena sebagian besar aktivitas manusia berada di darat.

Khusus untuk lalu lintas, merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat perkembangan Kota Bandar Lampung yang pesat. Perkembangan kota Bandar Lampung dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama pembangunan fisik seperti jalan, gedung, pusat perbelanjaan, dan industri. Dengan adanya perkembangan kota yang cukup pesat, maka juga berpengaruh terhadap meningkatnya arus lalu lintas di jalan raya.

Penanganan masalah kelancaran arus lalu lintas dan menertibkan arus lalu lintas merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, khususnya bidang lalu lintas jalan yang memiliki tugas mengatur lalu lintas agar arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, terdapat sejumlah titik kemacetan di wilayah Bandar Lampung, terutama pada jam-jam sibuk.

Beberapa tempat yang mengalami kemacetan antara lain seperti di ruas jalan utama kota Bandar Lampung yaitu ruas Jl. Raden Intan, simpang Mall Boemi Kedaton dan simpang Unila, Jend.Sudirman, Dr. Susilo, Gajah Mada, Cut Nyak Dien, Sisingamaraja, Kimaja dan Ahmad Yani. Berdasarkan beberapa contoh kawasan ini, maka dapat dipahami jika sering terjadi kemacetan lalu lintas di tambah banyaknya pelanggaran lalu lintas. Hal ini dikarenakan pada kawasan-kawasan tersebut merupakan sentra kegiatan perdagangan di Kota Bandar Lampung.

Kemacetan yang berujung pelanggaran lalu lintas yang terjadi di beberapa kawasan tersebut juga telah ditangani oleh Dinas Perhubungan, khususnya bidang lalu lintas jalan dengan membuat rambu-rambu lalu lintas serta pemasangan lampu pengatur lalu lintas. Meskipun Dinas Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan tersebut, belum tentu dapat mengurangi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas yang ada. Hal ini dikarenakan ruas jalan badan jalan sudah tidak dapat menampung dengan semakin banyaknya kendaraan yang melintas di tambah sumber daya manusia untuk mengatur lalu lintas kurang memadai.

Selain masalah kemacetan dan pelanggaran lalu lintas, Dinas Perhubungan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti memberikan pengawalan terhadap tamu VIP/VVIP, penyelenggaraan pelayanan untuk pemudik pada hari raya Idul Fitri dengan mendirikan Rest Area. Pelayanan, pengendalian dan pengaturan lalu lintas pada Natal, Tahun Baru, serta Pelayanan, pengendalian dan pengaturan lalu lintas pada event-event

besar yang diadakan di Kota Bandar Lampung. Dinas Perhubungan juga melaksanakan kegiatan perlindungan keselamatan di kawasan sekolah dengan menetapkan kawasan sekolah yang lokasinya rawan kemacetan dan rawan kecelakaan sebagai Zoss (Zona Selamat Sekolah) di 9 titik dengan memberikan bantuan setiap kawasan berupa rambu, rambu portabel penyeberangan lalu lintas, traffic cone, Jembatan Penyabrang Orang, Zebra Cross, dan Halte.

Peran Dinas Perhubungan, khususnya bidang lalu lintas dapat terlihat dari kelancaran arus lalu lintas yang ada di wilayah kerjanya. Saat ini, Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan jumlah penduduk yang cukup padat, sehingga dengan sendirinya juga berpengaruh terhadap kepadatan arus lintas dan makin banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Hal ini sesuai dengan salah satu sasaran dari Dinas Perhubungan, yaitu terwujudnya sistem manajemen transportasi lalu lintas yang baik, aman, nyaman dan terkendali sehingga dapat tercapai kelancaran arus lalu lintas.

Adapun prestasi kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung antara lain telah memperoleh piala WTN (Wahana Tata Nugraha) sebanyak 4 kali secara berturut-turut (tahun 2014-2017) kategori kota besar dalam lomba tertib lalu lintas. Di samping itu, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung juga telah menggunakan beberapa titik sensor jarak jauh yang disebut *Automatic Traffic Computerize Signal (ATCS)*. ATCS telah ditempatkan antara lain di wilayah :

Tabel 1 . Data Lokasi CCTV yang ada di Kota Bandar Lampung

NO	NAMA SEMPANG	NAMA JALAN
1	Simpang Tugu Radin Intan	Jl. ZA Pagar Alam - Jl.Sudirman - Jl.Sudirman
2.	Simpang Pramuka	Jl.ZA.Pagar Alam -Jl.Pramuka - Jl. ZA Pagar Alam
3.	Simpang Terminal Raja Basa	Jl.Pagar Alam - Jl.Pagar Alam - Jl.Indra
4.	Simpang Unila	Jl.ZA.Pagar Alam -Jl.Sumantri - Jl.ZA.Pagar Alam
5.	Simpang Mall Boemi Kedaton	Jl.Teuku Umar - Jl.Sultan Agung - Jl. ZA.Pagar Alam
6.	Simpang Rs. Urip	Jl. Teuku Umar - Jl.Urip Sumoharjo - Jl. Teuku Umar
7.	Simpang Rs. Umum	Jl.Rs.Abdul Moeloek
8.	Simpang Tugu Juang	Jl.Kartini - Jl.Raden Intan - Jl Teuku Umar
9.	Simpang Tugu Adi Pura	Jl.Diponogoro - Jl. Jendral Sudirman - Jl.Radin Intan
10.	Simpang Basuki Rahmat	Jl. Wolter Mongonsidi - Jl.Cut Mutia - Jl. Basuki Rahmat - Jl. Wolter Mongonsidi
11.	Simpang Gubernur	Jl.Wolter Mongonsidi - Jl.Dr. Warsito - Jl. Wolter Mongonsidi - Jl.Dr.Warsito

Sumber : Bidang Lalu Lintas Jalan *Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2018*

Hal tersebut merupakan prestasi kerja yang baik dari Dinas Perhubungan karena telah berhasil menciptakan komputerasi dengan sistem CCTV yang bertujuan untuk memudahkan petugas Dinas Perhubungan dalam memantau setiap daerah rawan macet sehingga kemacetan dapat ditanggulangi.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah suatu organisasi yang memiliki visi dan misi yaitu pelayanan kepada masyarakat umum. Dinas Perhubungan merupakan organisasi publik yang bertanggung jawab atas sistem lalu lintas di Bandar Lampung sehingga dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perbaikan dalam rangka mengantisipasi berbagai masalah lalu lintas yang semakin kompleks.

Selama ini citra pelayanan organisasi publik lebih rendah dibanding organisasi swasta. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat diperlukan pengkajian dan pengembangan peran sehingga peranan organisasi dapat optimal. Hal ini perlu dilakukan karena seiring dengan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas, maka organisasi publik harus mengubah citra kinerjanya agar menjadi lebih baik. Dengan demikian akan dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memakai indikator Regulator, Fasilitator, dan Evaluator dalam melaksanakan peranannya. Salah satu yang dapat dijadikan indikator dalam menilai peranan dari suatu organisasi publik adalah hasil (*outcomes*). Hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan di bidang lalu lintas Jalan, bidang angkutan jalan & perhubungan laut, bidang sarana, prasarana & pembinaan keselamatan, bidang perparkiran, UPT Pengujian

Kendaraan Bermotor dan UPT Terminal utamanya di bidang lalu lintas jalan. Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah :

1. Terwujudnya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali.
2. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman.
3. Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan merata pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar- besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, Peran Dinas Perhubungan sangat penting sekali dalam hal mobilitas kendaraan di Kota Bandar Lampung, terutama mengenai kemacetan lalu lintas akibat dari perkembangan kota yang semakin pesat.

Namun demikian, untuk menilai suatu peran dari organisasi publik tidak cukup hanya melihat dari segi hasilnya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peranan organisasi publik yang memiliki volume kegiatan tinggi seperti halnya Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan bagaimana cara mengatasi hambatan untuk meningkatkan peran Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kota Bandar Lampung seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan lingkungan guna mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul dalam penulisan penelitian ini, adalah **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat di lihat Fokus Penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat DISHUB dalam Melaksanakan Peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Kota Bandar Lampung
3. Bagaimana mengatasi hambatan untuk meningkatkan Peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Kota Bandar Lampung

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu pada masalah Peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya pembelajaran PPKn dalam kawasan nilai-nilai Hukum Kemasyarakatan agar tertanam di hati sanubari mahasiswa agar dapat menaati peraturan lalu lintas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan kepada:

a. Bagi Organisasi Terkait

1. Dapat memberikan masukan bagi Dinas Perhubungan, khususnya bidang lalu lintas Kota Bandar Lampung.
2. Untuk memperbaiki kondisi instansi terkait di masa depan.

b. Bagi Penelitian ini

1. Penulis dapat menambah wawasan, gambaran dan informasi-informasi yang berkaitan dengan bidang ilmu dan kegiatan administratif pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
2. Penulis dapat menyalurkan ilmu yang telah diperoleh dari perguruan tinggi dan menerapkannya ke dalam dunia kerja.

c. Bagi Pihak Lain

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Pelanggaran Hukum
2. Memberikan tambahan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang peran pada instansi pemerintahan lain.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ilmu

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya kajian Hukum dan Kemasyarakatan

2. Objek

Objek penelitian ini adalah Peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung

3. Subjek

Subjek penelitian ini Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kasubbag Program dan Informasi, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Petugas Lapangan, dan Masyarakat Pengguna Jalan

4. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

5. Waktu

Waktu penelitian dalam penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor : 4430/UN26.13/PN.01.00/2018 Tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

Deskripsi teori berisikan tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian.

1. Tinjauan Tentang Teori Peran

a. Pengertian Tentang Peran

Kata peran sering terdengar dan dikaitkan dengan posisi seseorang dan kedudukan seseorang. Peran dapat dikaitkan juga dengan apa yang dilakukannya dan apa yang dimainkannya, oleh seseorang aktor dalam suatu drama. Tidak banyak orang yang tahu tentang kata peran, atau dalam bahasa Inggrisnya *role* yang memang diambil dari kata *dramaturgy* atau seni tari. Lebih jelasnya kata peran atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* diartikan sebagai *Actor's part; one's task or function*. Artinya aktor; tugas seseorang atau fungsi.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “peran yang berarti perangkat tingkah atau karakter yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2009:212-2013), yaitu “peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Dalam hal ini peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Sebagai pola perlakuan , peran memiliki beberapa unsur, antara lain :

- a) Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu.
- b) Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam

kehidupan nyata. Peranan yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tindakan atau perilaku yang dilaksanakan sesuai dengan kedudukan atau status yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan hak dan kewajibannya.

2. Tinjauan Tentang Organisasi

a. Pengertian Tentang Organisasi

Menurut Sign (2007:12) Organisasi merupakan bentuk setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan sedangkan menurut Mooney (2007:214), Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai maksid bersama.

Pendapat lain menurut Trisnayadi (2009:79) Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari berorganisasi. Berorganisasi dapat menjadi sarana pergaulan dan pengenalan sifat dan watak manusia. Bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda organisasi dapat menjadi wahana untuk melatih diri dalam mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Disamping itu, organisasi juga merupakan wahana pengembangan diri dan kepribadian. Hal ini

penting sekali bagi mereka yang punya keinginan untuk menjadi pemimpin dikemudian hari.

Manfaat lain dari organisasi adalah memupuk kerja sama dan gotong royong antara sesama manusia, karena salah satu unsur organisasi adalah kerja sama. Dari beberapa pendapat menurut para ahli maka, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualisnya masing-masing yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

Agar tujuan organisasi dan tujuan individu dapat tercapai secara selaras dan harmonis maka diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak (pengurus organisasi dan anggota organisasi) untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab, sehingga pada saat masing-masing mendapatkan haknya dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi anggota organisasi/pegawai maupun. Berorganisasi dapat menjadi sarana pergaulan dan pengenalan sifat dan watak manusia. Bagi pelajar, mahasiswa dan pemuda organisasi dapat menjadi wahana untuk melatih diri dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Disamping itu, organisasi juga merupakan wahana pengembangan dan kepribadian.

b. Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi pelaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung di bidang Perhubungan, dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 50 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah Unsur Pelaksana Teknis di bidang Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung.

c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 50 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Perhubungan
- b. Sekretaris Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program dan Informasi
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan dan Asset

- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
 - 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
- d. Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut, terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan Orang
 - 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus
 - 3. Seksi Perhubungan Laut
- e. Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan, terdiri dari
 - 1. Seksi Teknik Sarana
 - 2. Seksi Teknik Prasarana
 - 3. Seksi Pembinaan Keselamatan
- f. Bidang Perparkiran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan Perparkiran
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Perparkiran
 - 3. Seksi Pendapatan Perparkiran
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Kepala Tata Usaha UPT. PKB
 - 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal
 - Kepala Tata Usaha UPT. Terminal

d. Ruang Lingkup Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 50 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut, Bidang Sarana Prasarana dan Pembinaan Keselamatan serta Bidang Perparkiran berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya (Regulator)
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan Pembuat Kebijakan Fasilitas dan Pengawasan (Fasilitator)
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya (Evaluator)
5. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tinjauan Tentang Ketertiban Lalu Lintas

Tertib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya teratur, menurut aturan, rapi yang tidak lain juga sopan sepatutnya aturan dan peraturan yang baik. Jadi kata tertib merupakan sebuah peraturan, budaya dan

dilakukan baik oleh masyarakat akan tercipta keadaan yang tertib, rapi teratur yang manfaatnya tentu dirasakan oleh semua pihak.

Salah satu tolak ukur seorang dikatakan disiplin dalam berkendara adalah menjalankan tata tertib dengan sikap dan perilaku yang baik. Setiap lembaga-lembaga publik mempunyai tata tertib yang digunakan sebagai alat untuk mengatur aktivitas individu-individu yang berada dalam ruang lingkup lembaga tersebut dan tata tertib dibuat agar tujuan dari lembaga tersebut dapat tercapai.

Perilaku tertib berlalu lintas merupakan sama halnya dengan perilaku disiplin berlalu lintas yang mempunyai kesamaan yaitu aturan yang harus dipatuhi. Tertib merupakan teratur dan rapi yang tidak lain juga sopan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas yang tidak lain ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Mengenai ketertiban berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa ketertiban berlalu lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Perilaku

pengendara lalu lintas yang mempengaruhi perilaku berlalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 pasal 105 huruf (a) dan (b) yang berisi setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:

- a) Berperilaku tertib: dan/atau
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Terkait dengan ketertiban berlalu-lintas, dijelaskan dalam Pasal 106 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;

- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- e. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
- a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
 - b. Surat izin mngemudi;
 - c. Surat lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah.
- f. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di samping wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- g. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di samping wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- h. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- i. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketertiban berlalu lintas adalah perilaku patuh hukum dan aturan-aturan yang berlaku bagi para pengguna jalan dengan mengutamakan keselamatan bersama bagi pengguna jalan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Pada tingkat lokal terdapat penelitian Ghizie Gholib Izadi dari Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “Strategi Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Pada Kalangan Pelajar Remaja” Peneliti tersebut menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan strategi dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Terlihat pada hasil dan pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia pada struktur organisasi.
2. Pada tingkat nasional terdapat penelitian Tody Maulana Meditra dari Universitas Sebelas Maret Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “Kinerja Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta” Peneliti tersebut menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kota Surakarta selama tahun 2008 sudah cukup baik. Meskipun dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan tidak selalu berhasil. Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surakarta dapat

diketahui berdasarkan efektivitas organisasi, yaitu tercapainya kelancaran lalu lintas dan menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas. Selain itu, kinerja dinas juga dapat diketahui dari akuntabilitas organisasi, yaitu pertanggungjawaban anggaran yang digunakan berdasarkan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta kepada Dinas Perhubungan untuk pelaksanaan program kegiatan terutama untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta biaya operasional organisasi secara keseluruhan

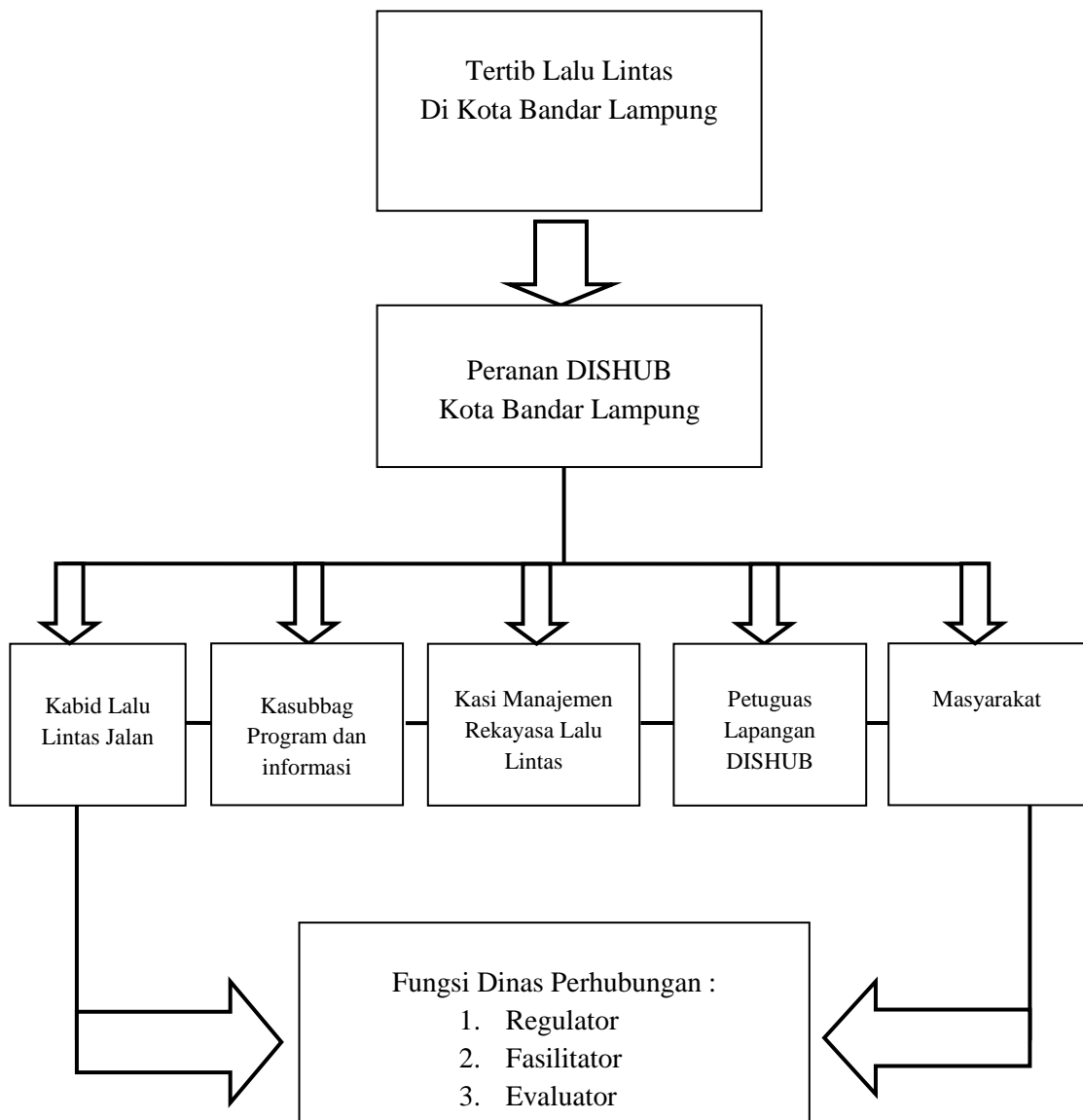
C. Kerangka Pikir

Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung merupakan kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan dan misi secara optimal sebagai hasilnya dan berimplikasi pada kesehatan dan kelangsungan hidup organisasi. Dengan pengukuran dan penilaian tentang Peranan ini Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mampu melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang diembankan kepadanya secara optimal dalam melayani masyarakat.

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sektor transportasi mempunyai peran yang penting dalam proses pembangunan karena dapat membantu kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas penduduk maupun barang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kawasan.

Apalagi Kota Bandar Lampung menempati posisi yang strategis sebagai simpul transportasi darat yang mencakup transportasi jalan raya Gerbang Pulau Sumatra ke Pulau Jawa dan sebaliknya maupun jalur kereta api sehingga berakibat pada kepadatan arus lalu lintas.

Indikator yang digunakan dalam mengukur peranan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ini dapat dilihat dari fungsi Dinas Perhubungan diantaranya yaitu Pembuat kebijakan (Regulator), Penyedia Fasilitas (Fasilitator) dan Pengawas (Evaluator). Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari faktor-faktor penunjang dan penghambat serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang berimplikasi terhadap keberhasilan program kerja yang telah ditetapkan sehingga apakah program kerja tersebut masih perlu diperbaiki lagi atau tidak. Adapun bagan kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung

Menurut Herdiansyah Haris (2012:9) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.”

Lebih lanjut menurut Strauss dan Corbin dalam Novita Tresiana (2013:14) “penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain kuantifikasi (pengukuran)”. Penelitian kualitatif menunjukkan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010:24) “Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah Peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan Peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.

C. Definisi Konseptual Dan Operasional

1. Definisi Konseptual

- a. Peran Dinas Perhubungan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
- b. Tertib Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan

2. Definisi Operasioanal

- a. Peran Dinas Perhubungan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
- b. Tertib Lalu Lintas adalah perilaku patuh hukum dan aturan-aturan yang berlaku bagi para pengguna jalan dengan mengutamakan keselamatan bersama bagi pengguna jalan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

D. Informan dan Unit Analisis

Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Arikunto (2010:16), “*snowball sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan”. Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi, dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kabid Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota BL
2. Kasubbag Program dan Informasi Dinas Perhubungan Kota BL
3. Kasi Manajemen Rekayasa Lalin Dinas Perhubungan Kota BL
4. Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Kota BL
5. Beberapa Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Bandar Lampung

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah Dinas Perhubungan yang melaksanakan program dalam mewujudkan tertib lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informan utama dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan dalam mewujudkan tertib lalu lintas yang ada di Kota Bandar Lampung. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah Masyarakat penggunaan jalan di Kota Bandar Lampung di mana informan tersebut akan mendukung sumber dari informan kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Moelong dalam Hardiansyah Haris (2010:118) “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut”.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh M. Aziz Firdaus (2012:35) bahwa “Penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi sikap, perilaku dan pengalaman responden melalui metode interview dan focus group.”

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*in depth interview*) kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Sub Bagian Program dan Informasi dan Beberapa masyarakat pengguna jalan untuk mengetahui hal – hal yang menyangkut tentang tertib lalu lintas yang ada. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*)

2. Observasi

Menurut Cartwright & Cartwright dalam ardiansyah Haris (2010:118) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu *tujuan* tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur karena mensyaratkan perilaku yang tampak. Melakukan pengumpulan data dengan mengamati proses Mewujudkan Tertib Lalu Lintas yang ada di Kota Bandar Lampung.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Hardiansyah Haris (2010:143) studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (*catatan peristiwa masalalu*) yang berkaitan dengan Tertib Lalu Lintas yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam melakukan tertib lalu lintas dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai tertib lalu lintas yang sedang terjadi.

Kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian

secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

G. Uji Kredibilitas

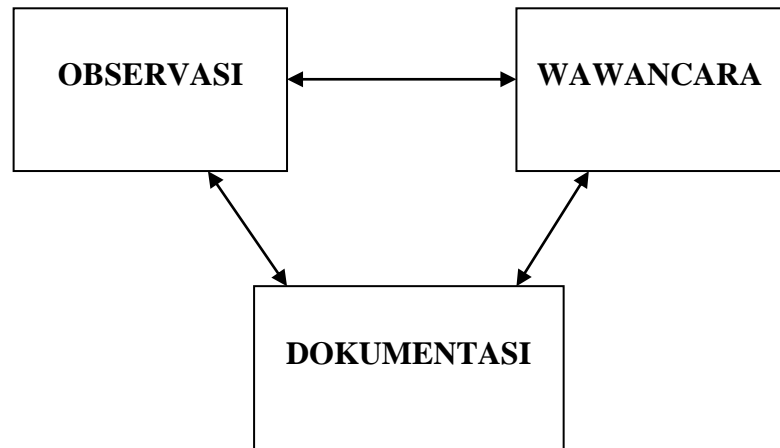
Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Triangulasi Menurut Denzin

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah menulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

2. *Tabulating dan Coding*

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data -data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk table dan diberi kode.

3. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk diberi maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

I. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu,

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu secara teliti dan rinci serta segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (*field note*). Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai analisis Peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung dengan cara sedemikian rupa dapat ditarik kesimpulan dan kemudian diverifikasi. Reduksi data dapat dirasakan setelah penelitian dilapangan dilakukan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat

ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang ada di kelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian- penyajian tersebut.

Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya proses Peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan Tertib Lalu Lintas yang Ada Di Kota Bandar Lampung.

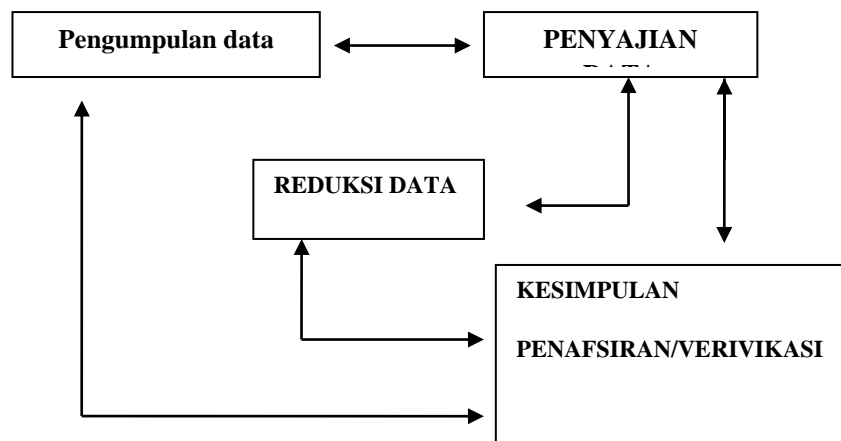
3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, selanjutnya mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan- kesimpulan yang longgar, tetap terbuka dan tidak skeptis, akan tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh, setelah itu kemungkinan akhir muncul sampai

pengumpulan data berakhir, bergantung pada kesimpulan - kesimpulan catatan lapangan kemudian pengkodeannya, penyimpanan, metode pencarian ulang yang dapat digunakan dan kecakapan peneliti.

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas yang Ada di Kota Bandar Lampung tersebut kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.

Teknik analisis data dalam penelitian penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



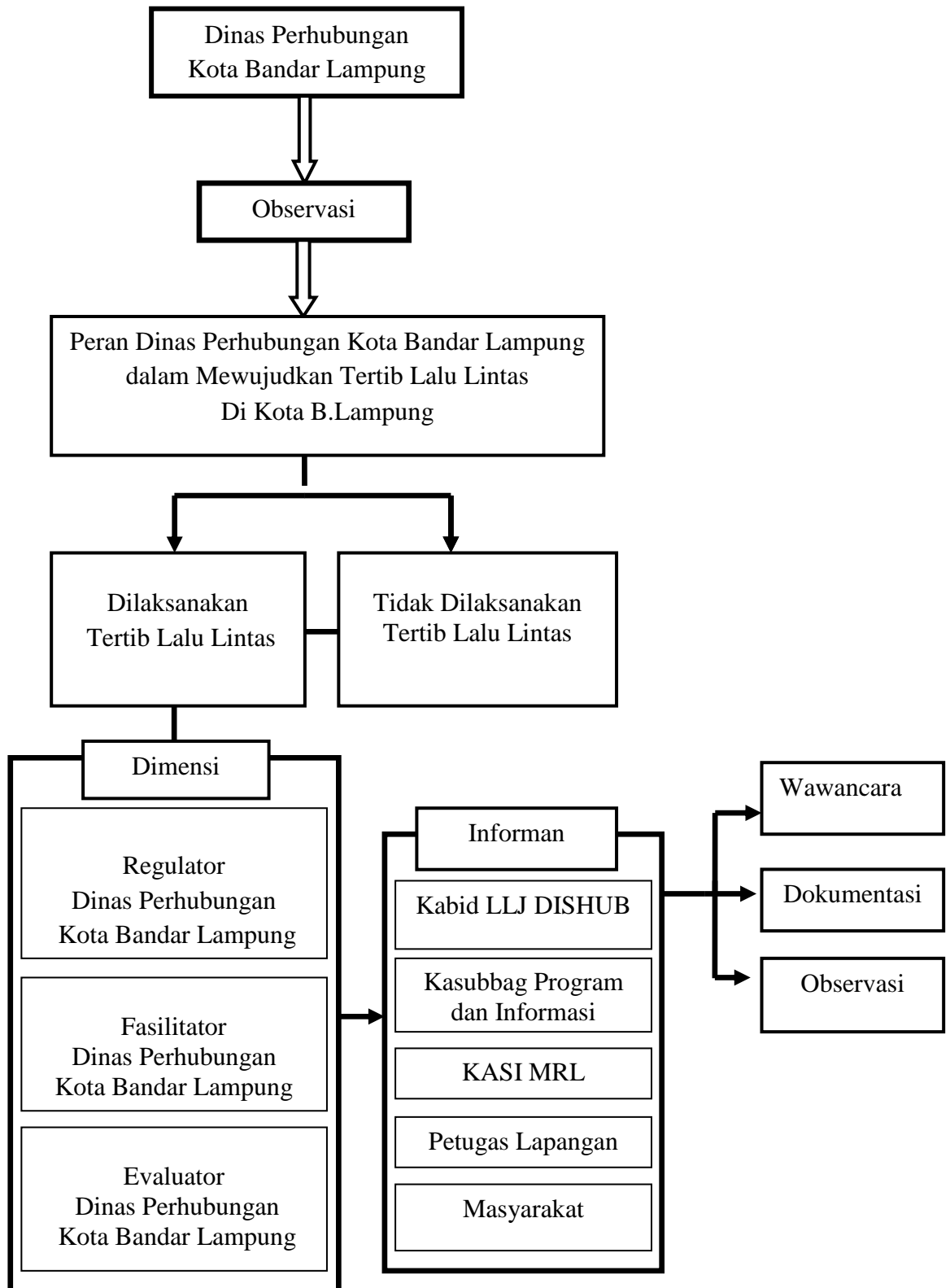
Gambar 3. Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

4. Rencana Penelitian

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan diatas.

Rencana penelitian digambarkan dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah menangkap bagaimanakah penelitian ini akan dilakukan

dengan teknik analisis yang akan di jelaskan di bawah ini.



Gambar 4. Rencana Penelitian

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung belum optimal. Berdasarkan tiga indikator yaitu Regulator, Fasilitator dan Evaluator, dapat diketahui bahwa pada indikator Evaluator belum dapat berjalan secara optimal. Lemahnya aspek evaluator dibuktikan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penerapan transportasi kota yang baik dengan penerapan transportasi kota yang baik maka permasalahan kemacetan yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas jalan dapat diminimalisirkan.

Dari hasil penelitian dan literatur-literatur penunjang mengenai perencanaan dan penerapan sistem transportasi yang baik dalam mengatasi kemacetan dan mewujudkan tertib lalu lintas jalan di Kota Bandar Lampung, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pada rencana dan strategi (renstra) Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Walikota nomor 50 tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Pemerintah Kota Bandar Lampung

secara normatif memiliki desain yang cukup komprehensif. Adapun faktor-faktor penghambat pada kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan untuk mencapai sistem transportasi Kota yang baik adalah :

1. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan tenaga teknis perhubungan
2. Prasarana dan fasilitas perhubungan masih sangat minim dan banyak terdapat fasilitas perhubungan yang mengalami kerusakan
3. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas
4. Kurangnya efisien dan efektifitas setiap kebijakan yang telah dibuat untuk mewujudkan tertib lalu lintas yang aman,nyaman dan tertib.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan masukan atau saran bagi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung terhadap peran, yaitu :

1. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebaiknya dapat melakukan rekrutmen ketenagakerjaan dengan berlatarbelakang teknis perhubungan dengan melakukan kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Perhubungan dalam perekrutan pegawai di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung serta diharapkan dapat terus melakukan diklat atau pelatihan terhadap petugas lapangan agar

kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan lancar ketika diterapkan di lapangan.

2. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebaiknya dapat mengalokasikan dana seperti menaikkan tarif pajak parkir dan pajak kendaraan bermotor yang nantinya dana tersebut dapat dijadikan pembangunan fasilitas perhubungan.
3. Dinas Perhubungan seharusnya melakukan sosialisasi tentang berkendara yang baik dan benar atau *Safety Riding* yang ditujukan untuk masyarakat di Kota Bandar Lampung.
4. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung seharusnya memiliki program kerja yang konkret dan operasional dalam menyelesaikan permasalahan tertib lalu lintas di Bandar Lampung baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Seperti bekerjasama dengan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar bermotor yang nantinya masyarakat akan berfikir kembali untuk menggunakan atau menambah lagi kepemilikan kendaraan pribadi. Setelah itu Dinas Perhubungan juga dapat membuat kebijakan aturan jalan berbayar atau *Electronic Road Riding* di suatu kawasan. Dan juga Dinas Perhubungan sebaiknya membuat kebijakan larangan terhadap siswa-siswi di sekolah untuk tidak membawa kendaraan bermotor dan lebih menggunakan angkutan massal saja.
5. Dinas Perhubungan sebaiknya menghindari adanya kebijakan yang tidak sesuai harapan dan kenyataan pada pelaksanaan di

lapangan dengan melakukan evaluasi secara berkala dan komprehensif, sehingga kebijakan yang diberlakukan tepat sasaran.

6. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung seharusnya segera menyiapkan alternatif model transportasi massal yang efektif dan efisien dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat kedepan. Seperti Dinas Perhubungan mampu mengedepankan kebijakan transportasi massal seperti pembuatan kebijakan pembangunan *Commuter Line* atau kereta cepat untuk mengedepankan transportasi massal yang aman, cepat, tepat, dan terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*, Jakarta, Grasindo.
- Dessler, Gary, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Prenhalindo: Jakarta.
- Firdaus, M. 2011. *Metode Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Harbani Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humaniora
- <https://www.lampung.antaranews.com> Edisi Sabtu, 17 Desember 2016 diakses pada Senin 27 Maret 2017 tentang Kemacetan di Kota Bandar Lampung Belum Teratasi
- Lembaga Administrasi Negara, 1999, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/99, *Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 50 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- Radar Lampung, Edisi Senin, 17 April 2017 tentang BRT Contoh Bad Policy

Ruffner, Michael dan Joaquin Sevilla, 2004, "Public Sector Modernisation: Modernising Accountability and Control", *OECD Journal on Budgeting - Volume 4 - No.2 - ISSN 1608-7143*, www.google.com.

Sangadji, EM., dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: 2010.

Sri Budi Cantika Yuli, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang, UMM Press.

Suyadi Prawirosentono, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*. 1999. Yogyakarta : BPF.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wahyudi Kumorotomo, 1996, "Meningkatkan Kinerja BUMN: Antisipasi Terhadap Kompetisi dan Kebijakan Deregulasi", *JKAP* No.1, Yogyakarta.